



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**”Peran Al Jazeera Dalam Mendukung Pemerintah Qatar saat Arab Spring”**

Skripsi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Muhammad Yoga Satria Simo Wibowo  
2017330136

Bandung

2022



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**”Peran *Al Jazeera* Dalam Mendukung Pemerintah Qatar saat Arab Spring”**

Skripsi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Muhammad Yoga Satria Simo Wibowo  
2017330136

Pembimbing

Prof.Sukawarsini Djelantik,Dra., M.Int.S., Ph.D

Bandung

2022

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Jurusan Hubungan Internasional**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**



**Tanda Pengesahan Skripsi**

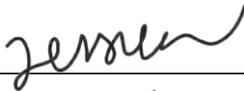
Nama : Muhammad Yoga Satria Simo Wibowo  
Nomor Pokok : 2017330136  
Judul : Peran Al Jazeera dalam Mendukung Pemerintah Qatar saat Arab Spring

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Senin, 4 Juli 2022  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

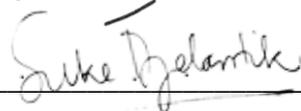
**Ketua Sidang merangkap anggota**

Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.

: 

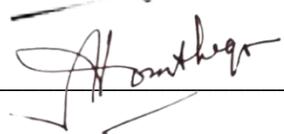
**Sekretaris**

Prof. Dra. Sukawarsini Djelantik, M. Int. S., Ph.D.

: 

**Anggota**

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si  
**PERNYATAAN**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yoga Satria Simo Wibowo  
NPM : 2017330136  
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : "Peran *Al-Jazeera* Dalam Mendukung Pemerintah Qatar saat Arab Spring"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah hasil penelitian sendiri dan bukanlah karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang telah dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang telah sesuai dengan syarat.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar adanya.

Bandung, 15 Juni 2022



Muhammad Yoga Satria Simo Wibowo

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Yoga Satria Simo Wibowo  
NPM : 2017330136  
Judul : ”Peran *Al Jazeera* Dalam Mendukung Pemerintah Qatar saat Arab Spring”

---

Media massa pada saat ini telah memasuki periode perkembangan teknologi yang sangat signifikan, khususnya pada bidang informasi dan komunikasi. Hal ini mengalami peningkatan yang sangat pesat dan telah dijadikan sebagai alat baru yang digunakan oleh dunia internasional. Kebebasan dalam menggunakan media sosial memberikan kemudahan bagi orang-orang yang membutuhkan sebuah informasi dan digunakan sebagai penggerak roda globalisasi. Begitupun dengan topik yang dibahas oleh penelitian ini yang membahas mengenai peran *Al Jazeera* dalam mendukung pemerintah Qatar saat Arab Spring berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan bentuk dukungan yang dilakukan oleh *Al Jazeera* dalam mendukung pemerintah Qatar saat Arab Spring. Penelitian ini menggunakan sebuah Pendekatan Konstruktivisme sebagai ”Nyawa” dari penelitian ini. Untuk ”Pisau Analisa” yang dipakai di dalam penelitian ini menggunakan sebuah Teori Diplomasi Publik, dalam hal ini membahas mengenai kebijakan luar negeri negara-negara yang terlibat serta berkaitan dengan *Al Jazeera* itu sendiri, khususnya dalam hal pemberitaan atau penyebaran suatu informasi. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya *Al Jazeera* saat ini telah menjadi kekuatan tersendiri dalam hal media publikasi, khususnya di kawasan Timur Tengah hingga di kawasan Internasional sekalipun. Hingga saat ini Qatar menggunakan *Al Jazeera* untuk memperlancar kepentingan-kepentingan Qatar melalui program-program yang dibuat oleh media massa tersebut.

Kata Kunci : *Al Jazeera*, Arab Spring, Kebijakan Luar Negeri, Media Massa

## ABSTRACT

Nama : Muhammad Yoga Satria Simo Wibowo  
NPM : 2017330136  
Judul : "Al Jazeera's Role in Supporting the Government of Qatar during the Arab Spring"

---

*Mass media at this time has entered a period of very significant technological development, especially in the field of information and communication. This has experienced a very rapid increase and has been used as a new tool used by the international world. Freedom in using social media makes it easier for people who need information and is used as a driving force for globalization. Likewise with the topic discussed by this study which discusses Al Jazeera's role in supporting the Qatari government during the Arab Spring. This study aims to find out how the role and form of support carried out by Al Jazeera in supporting the Qatari government during the Arab Spring. This study uses a Constructivism Approach as the "Life" of this study. For the "Analytical Knife" used in this study using a Public Diplomacy Theory, in this case discussing the foreign policy of the countries involved and relating to Al Jazeera itself, particularly in terms of reporting or disseminating information. The research method used in this study uses qualitative research methods. The findings of this study explain that Al Jazeera has now become a force in itself in terms of publication media, especially in the Middle East region to the region International though. Until now Qatar has used Al Jazeera to smooth qatari interests through programs created by the mass media.*

*Keywords : Al Jazeera, Arab Spring, Foreign Policy, Mass Media*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "Peran *Al Jazeera* Dalam Mendukung Pemerintah Qatar saat Arab Spring". Adapun penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Kemajuan teknologi dewasa ini telah mempengaruhi pola hidup dan interaksi masyarakat dalam mendapatkan informasi. Kemudahan mendapatkan informasi ini karena adanya media massa yang selalu menyebarkan berbagai informasi ke ruang lingkup negara, maupun ruang lingkup Internasional. Kehadiran media massa *Al Jazeera* merupakan salah satu contoh alat untuk masyarakatan mendapatkan informasi yang notabene merupakan informasi yang terjadi terhadap sirkulasi maupun pergolakan yang terjadi. Melalui media massa ini telah mempengaruhi pemikiran masyarakat terhadap suatu permasalahan serta mempengaruhi pihak lain yang merasa dirugikan menjadi resah atas informasi-informasi yang dipublikasikan oleh media massa *Al Jazeera*.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menerima berbagai jenis masukan, kritik, dan saran yang dapat membantu penyempurnaan penelitian skripsi ini. Penulis mempunyai harapan agar penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pembaca dan khususnya akademisi Ilmu Hubungan Internasional

Bandung, 15 Juni 2022

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
UCAPAN TERIMAKASIH.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GRAFIK DAN TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	7
1.3 Perumusan Masalah .....	8
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.5 Kajian Pustaka .....	8
1.6 Kerangka Teoritis.....	12
1.7 Metode Penelitian .....	21
1.8 Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.9 Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II PRAKTIK KEBIJAKAN DIPLOMASI PUBLIK QATAR MENGGUNAKAN MEDIA <i>AL JAZEERA</i> .....	24
2.1 Struktur Pemerintahan Qatar.....	24
2.2 Sistem Politik Qatar .....	27
2.3 Sejarah <i>Al Jazeera</i> .....	42
2.4 Dampak keberadaan <i>Al Jazeera</i> Terhadap Praktik Jurnalisme .....	46
BAB III PERAN DAN BENTUK DUKUNGAN <i>AL JAZEERA</i> DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH QATAR SAAT <i>ARAB SPRING</i> .....	50
3.1 Peran <i>Al Jazeera</i> Dalam Peristiwa Arab Spring di Qatar.....	51
3.1.1 Program Wawancara ” <i>The Opposite Direction</i> ” .....	52
3.1.2 Diskusi Publik ”Talk of Revolution” .....	54
3.1.3 Peran <i>Al Jazeera</i> Selama Arab Spring .....	55

3.2 Dukungan <i>Al Jazeera</i> Dalam Praktik Kebijakan Diplomasi Publik Qatar.....	59
3.4 Diplomasi Publik Qatar Melalui <i>Al Jazeera</i> .....	66
BAB IV KESIMPULAN .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	74

## DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

<b>Grafik 3.1 Topik Pemberitaan Al Jazeera Terhadap Arab Saudi Saat Terjadinya Konflik</b> .....	65
<b>Tabel 3.1 Judul Berita di Situs Al Jazeera Pada Tahun 2011-2012</b> .....	63

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1 Peta Negara Qatar .....</b>	<b>25</b>
<b>Gambar 3.1 Dokumen Dukungan Qatar Terhadap TV Al Jazeera.....</b>	<b>60</b>
<b>Gambar 3.2 Peta Pemutusan Hubungan Diplomatik Terhadap Qatar .....</b>	<b>66</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Media massa pada dewasa ini telah memasuki perkembangan teknologi khususnya pada bidang informasi maupun komunikasi yang sangat pesat dan telah dijadikan sebagai alat baru yang dipergunakan oleh dunia internasional, khususnya oleh negara-negara yang membutuhkan kekuatan dari media massa itu sendiri. Kebebasan dalam menggunakan media memberikan kemudahan bagi pelaku-pelaku yang membutuhkannya dan digunakan sebagai penggerak roda globalisasi serta melibatkan keterlibatan publik secara umum dalam situasi hubungan internasional. Kebebasan bermedia massa ini telah memberikan kekuatan di kancah internasional serta telah memberikan kekuatan tersendiri terhadap masyarakat internasional itu sendiri. Kekuatan sebuah media bisa menjadi pengaruh bagi kepentingan kelompok, individu maupun sebuah negara ataupun elit politik. Hal tersebut bisa dikatakan bahwasanya media massa dapat membuat dampak yang sangat besar bagi aktor-aktor di sebuah negara.

Sheikh Emir Hamad bin Khalifa Al – Thani pada tahun 1995 menjabat sebagai pemimpin Qatar, pada saat itu pula reformasi liberal dilakukan olehnya di kawasan Timur Tengah. Program ini mencapai keberhasilan setelah munculnya kebebasan bermedia dan dihapusnya Kementerian Informasi Qatar oleh Emir Hamad. Bukan hanya penghapusan Kementerian Informasi, Emir Hamad pun membuat sebuah media yang bertujuan untuk menghapus segala kontrol penuh terhadap pemerintah dan penyiaran informasi dalam ruang lingkup regional. Kemunculan *Al*

*Jazeera* sebagai media massa yang berbasis di Doha, Qatar yang merupakan sebuah media massa yang bersifat independen dan dibentuk sekaligus didanai oleh Pemerintah Qatar. Kemunculan *Al Jazeera* ini berawal dari diberhentikannya ratusan pekerja *British Broadcasting Corporation* (BBC) dan tentunya Pemerintah Qatar memanfaatkan peluang tersebut untuk membuat sebuah media massa dengan cara memperkerjakan kembali pekerja yang diberhentikan oleh BBC.

Pada awalnya *Al Jazeera* ini di konsentrasikan sebagai media yang membahas berbagai macam permasalahan yang ada di kawasan Timur Tengah seperti ekonomi, sosial, politik dan budaya. Akan tetapi seiring perkembangannya, *Al Jazeera* menjadi media yang sangat aktif dalam meliput seluruh permasalahan yang ada di Timur Tengah dan yang paling menarik perhatian adalah permasalahan tentang *Arab Spring*. Pada akhir tahun 2010, hingga memasuki tahun 2011 terjadi serangkaian demonstrasi damai yang meletus di beberapa negara Arab yang dikenal dengan "*Arab Spring*" dimana setelah puluhan tahun otoritarianisme bersama dengan represi politik dan sipil, sentimen ketidakpuasan dan kekecewaan berkembang selama bertahun-tahun di antara penduduk Arab. Gerakan dimulai di Tunisia ketika demonstrasi massa dengan kejam terjadi melawan standar diktator yang panjang dari penguasa, gerakan ini didominasi oleh kaum muda dengan membawa isu reformasi ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Zahraa Barakat and Ali Fakhri, "Determinants of the Arab Spring Protests in Tunisia, Egypt, and Libya: What Have We Learned?," *Social Sciences* 10, no. 8 (2021): 282, <https://doi.org/10.3390/socsci10080282>. hlm.2

Salah satu dampak yang terjadi dari peristiwa *Arab Spring* adalah mengakibatkan hubungan yang kurang baik antara Qatar dengan Arab Saudi.<sup>2</sup> Para pemimpin Qatar melihat pemberontakan sebagai kesempatan untuk menutup pengaruh regional dan internasional mereka daripada sebagai tantangan terhadap otoritas pemerintahan.<sup>3</sup> Munculnya Qatar sebagai negara dengan pondasi ekonomi yang kuat dan semakin berpengaruh di Timur Tengah, menjadi ancaman tersendiri bagi Arab Saudi terlebih kebijakan Qatar sejak Syekh Hamad Khalifah Al Thani dan penerusnya Syekh Tamim bin Hamad Al Thani sering berseberangan dengan Arab Saudi terutama dalam kasus *Arab Spring*. Stabilitas politik dalam negeri Arab Saudi yang memanas akibat *Arab Spring* dipropaganda oleh Qatar melalui saluran televisi *Al Jazeera*. Pemberitaan *Al Jazeera* yang sering menyudutkan Arab Saudi baik dalam ekonomi, politik dan kebijakan yang otoritarian menjadikan kebijakan keras terhadap Qatar menjadi pilihan yang diterapkan Arab Saudi. Tindakan yang diambil oleh Arab Saudi ialah menarik kedutaan besar dari Qatar dan memblokir negara tersebut.<sup>4</sup>

*Al Jazeera* diluncurkan pada tahun 1996, pada saat itu mengguncang seluruh media Arab, dimana seharusnya siaran berita televisi yang dikendalikan pemerintah harus mengedepankan norma dan aturan, sementara *Al Jazeera* menampilkan tayangan dengan standar produksi yang rendah. *Al Jazeera* menawarkan liputan politik kawasan yang relatif tanpa sensor dengan tampilan program berita Barat yang ramping seperti yang ada di *British Broadcasting Corporation* (BBC) dan *Cable News Network* (CNN). Secara lebih luas, saluran tersebut menjadi

---

<sup>2</sup> Sukma Bintang Cahyani, "Faktor-Faktor Manuver Politik Qatar Dalam Penguatan Aliansi Dengan Iran Pasca Kasus Krisis Diplomatik Qatar Tahun 2017," *Journal of International Relations* 5, no. 3 (2019): 517–27. Hlm.519

<sup>3</sup> Kristian Coates Ulrichsen, "Qatar and the Arab Spring," Oxford University Press, 2021, <https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780190210977.001.0001/acprof-9780190210977>. (diakses 18 September 2021)

<sup>4</sup> Fakhry Ghafur, *Politik Islam Arab Saudi, Kuwait, & Uni Emirat Arab* (Jakarta: Lipi Press, 2019). Hlm.73

kontroversial karena liputannya tentang perang Amerika di Afghanistan dan Irak. Pemerintahan George W. Bush menganggap liputannya menghasut karena menyoroti korban sipil dalam konflik tersebut, dengan pejabat pemerintah menuduh bahwa *Al Jazeera* memicu penentangan terhadap upaya Amerika Serikat di wilayah tersebut. *Al Jazeera* menjadi sumber kemarahan para penguasa Timur Tengah yang mewajibkan setiap pemberitaan harus memiliki kontrol. *Al Jazeera* telah melaporkan secara kritis tentang pemerintah terutama negara yang berseberangan dengan Qatar. Untuk acara *talkshow* misalnya *Al Jazeera* sering menampilkan tayangan yang memperdebatkan topik-topik seperti agama dan isu-isu perempuan dengan mengusung konsep “kebebasan berbicara” di dunia Arab. Saluran tersebut telah dilihat sebagai bagian *de facto* dari aparat kebijakan luar negeri Qatar.<sup>5</sup>

Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) sangat kecewa dengan *Al Jazeera* sendiri yang merupakan organisasi berita independen yang didanai sebagian oleh pemerintah Qatar. Pada tahun 2006, Jaringan Satelit *Al Jazeera* diubah menjadi utilitas publik, perusahaan swasta dengan memorandum publik dan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Qatar No. 21 tahun 2006, dan dinamai kembali “Jaringan Media *Al Jazeera*”.<sup>6</sup> Sejak pemberontakan *Arab Spring* 2011. Negara-negara tersebut memandang *Al Jazeera* bersimpati kepada para pengunjuk rasa, dan mengira jaringan itu mengobarkan api pemberontakan yang mengancam monarki di kawasan itu. Bahkan di tengah kontroversi, *Al Jazeera* terus memberitakan secara kritis tentang negara-negara Arab lainnya. Qatar telah menjelaskan kemarahan terhadap *Al Jazeera* yang dipimpin Saudi sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya. Bahkan jika Qatar berkompromi pada beberapa tuntutan, sangat tidak mungkin

---

<sup>5</sup> Naseem Zaitoon, “Why Some Arab Countries Want to Shutter Al Jazeera,” *The conversation*, 2017, <https://theconversation.com/why-some-arab-countries-want-to-shutter-Al-Jazeera-80600>.

<sup>6</sup> Al Jazeera, “About Us,” Al Jazeera Media Network, 2021, <https://www.AlJazeera.com/about-us>.

akan menutup *Al Jazeera*. Jaringan tersebut merupakan salah satu pencapaian khas Qatar, sebuah kendaraan yang membantu mendorong kebangkitan global negara kecil itu selama dua dekade terakhir.<sup>7</sup>

*Al Jazeera* berperan memfasilitasi penyebaran gelombang pemberitaan dari Tunisia ke Mesir dan keseluruhan wilayah Arab Saudi, bahkan *Al Jazeera English* (AJE) melakukan wawancara langsung dengan oposisi pemimpin Mesir dan menyediakan liputan berita 24/7 di lokasi paling berbahaya dibalik ini semua *Al Jazeera* melayani kepentingan rezim Qatar. Media dapat secara efektif mempromosikan kebijakan luar negeri suatu negara atau, dengan kata lain, bertindak sebagai instrumen diplomasi publik, namun harus bebas dari politik luar negeri suatu negara. *Al Jazeera* akan dianggap sebagai “alat diplomasi publik” dari kebijakan luar negeri Qatar. Namun, ketika liputannya konsisten dengan politik dan kepentingan Qatar, itu akan dianggap sebagai “alat propaganda.”<sup>8</sup>

Penelitian ini ditemukan bahwa *Al Jazeera* mengklaim bahwa mereka sama sekali tidak terikat dengan pemerintah dalam aspek penyiaran dan pengeditan berita, atau bisa disebut mereka independen atau terbebas secara editorial dari pemerintahan dan tidak terikat oleh kepentingan-kepentingan Qatar. *Al Jazeera* juga memiliki slogan yang berbunyi “*a voice to the voiceless*”, yaitu memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sesuai dengan asas kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> The Interpreter, “Qatar Crisis: Why the Saudis Want Al Jazeera Gone,” The interpreter, 2017, [https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/qatar-crisis-why-saudis--want-Al Jazeera-gone](https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/qatar-crisis-why-saudis--want-Al-Jazeera-gone).

<sup>8</sup> Zainab Abdul, “Al Jazeera’s Relationship with Qatar before and after Arab Spring: Effective Public Diplomacy or Blatant Propaganda?,” Arab Media and Society, 2018, <https://www.arabmediasociety.com/Al-Jazeeras-relationship-with-qatar-before-and-after-arab-spring-effective-public-diplomacy-or-blatant-propaganda/>. Hlm.12

<sup>9</sup> A A Gde Agung et al., “Al Jazeera Dalam Blokade Politik Qatar Tahun 2017,” *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 2 (2020): 1–15.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, menarik peneliti untuk menganalisis peran dan bentuk dukungan yang diberikan oleh *Al Jazeera* terhadap pemerintahan Qatar dengan menghubungkannya pada teori diplomasi media dan kebijakan luar negeri, untuk mengartikulasikan dan mempromosikan kebijakan luar negeri, disisi lain *Al Jazeera* menolak dianggap sebagai media yang berpihak terhadap Qatar dan kepentingan diplomasinya. Alasan peneliti untuk membahas mengenai permasalahan ini untuk mengetahui peran dan dukungan *Al Jazeera* terhadap pemerintahan Qatar.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Penggunaan media sebagai alat diplomasi dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri terlihat dari keberpihakan *Al Jazeera* yang dijadikan sebagai “alat diplomasi publik” dari kebijakan luar negeri Qatar. Hubungan antara negara Qatar dan *Al Jazeera* juga membatasi independensi dan objektivitas jaringan tersebut. *Al Jazeera* adalah saluran berita 24 jam pertama di dunia Arab, dan dengan jangkauan lebih dari 50 juta rumah Arab di Timur Tengah pada tahun 2006. Hubungan antara *Al Jazeera* dan negara Qatar juga menjadi bahan perdebatan dan kritik. Fakta bahwa *Al Jazeera* didirikan dan didanai oleh *Emir Qatar*, dengan anggaran tahunan sebesar \$300 juta, menjadikan klaim *Al Jazeera* atas kemerdekaan dan produksi informasi yang seimbang dan kredibel sebagai tindakan akurat. Selain itu, anggota formal Qatar dan keluarga kerajaan memegang posisi kunci di *Al Jazeera*, termasuk kepala dewan direksi yang merupakan mantan wakil menteri informasi sehingga independensi jaringan dan peran orang - orang yang menjadi latar belakang atas tindakan *Al Jazeera* ini perlu untuk dikaji dalam analisis penelitian yang akan diteliti.

Kecurigaan timbul dari negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya terkait ketimpangan berita yang dipublikasikan oleh *Al Jazeera*. Maksud dari hal ini adalah setiap pemberitaan yang diberitakan oleh *Al Jazeera* terkesan sangat membela Qatar dan menjatuhkan negara-negara lainnya, seperti Arab Saudi. Permasalahan ini dijadikan oleh peneliti untuk membahas serta analisis apa yang sebenarnya terjadi terhadap dinamika yang melibatkan *Al Jazeera*, Qatar dan negara-negara kawasan Timur Tengah lainnya.

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

*Al Jazeera* dipilih sebagai objek utama dalam penelitian karena peran *Al Jazeera* sebagai media massa yang dipergunakan oleh Qatar sebagai alat diplomasi publik. Meskipun Qatar terus menyatakan *Al Jazeera* TV terdaftar sebagai stasiun televisi swasta, independen, dan bebas dari unsur politik manapun, fakta yang ditemukan bahwa *Al Jazeera* TV terus menerima aliran dana dari pemerintah Qatar, dan betapa stabilnya kantor berita ini setelah beberapa kali mengalami guncangan seperti tidak tercapainya target pendapatan hingga kecaman dari negara-negara lain semakin memperkuat spekulasi bahwa ada kekuatan besar yang selalu menyokong stasiun televisi ini, yang tidak lain adalah Qatar.

Qatar telah sering mendapatkan hukuman dari negara-negara tetangga akibat daripada kebijakannya yang terlalu mengintervensi *Al Jazeera*. Keterlibatan Qatar menggunakan media *Al Jazeera* sebagai media intervensi terhadap permasalahan Arab Spring yang dianggap melanggar *Riyadh Agreement*, Hal ini dikarenakan Qatar dianggap memberikan fasilitas bagi kelompok revolusionis dan islamis politik maupun terorisme yang dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara yang berada di kawasan di Timur

Tengah dan Qatar mengalami krisis diplomatik. Maka dari itu dalam tulisan ini akan dibahas permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan ``Peran *Al Jazeera* dalam Mendukung Pemerintah Qatar saat *Arab Spring* `` yang berarti dalam tulisan ini akan lebih fokus terhadap pemberitaan yang dikeluarkan oleh media *Al Jazeera* yakni *Al Jazeera TV*, *Al Jazeera English*, & *Al Jazeera Arabic* dan bagaimana kaitannya dengan Qatar dalam menanggapi *Arab Spring* yang berfokus pada program acara yang dibuatnya, yakni Program Wawancara "*The Opposite Direction*" dan Diskusi Publik "*Talk of Revolution*".

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta pembatasan masalah yang telah tertera dan dideskripsikan sebelumnya. Maka rumusan masalah yang diambil oleh penulis untuk studi kasus ini adalah ``Bagaimana peran *Al Jazeera* dalam mendukung Pemerintah Qatar saat *Arab Spring*?``.

### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran dan bentuk dukungan *Al Jazeera* mendukung Diplomasi Publik Qatar saat *Arab Spring* . Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi bagaimana sebuah media dapat digunakan sebagai alat diplomasi ataupun agenda setting oleh suatu negara.

### **1.5 Kajian Pustaka**

Penelitian yang pertama yaitu artikel jurnal dari Agung, dkk pada tahun 2017 dengan

judul penelitian "Inisiasi Arab Saudi Menutup Platform Media Al Jazeera Dalam Blokade Politik Qatar Tahun 2017" Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang melatar belakangi inisiasi Arab Saudi untuk menutup *Al Jazeera* dengan menggunakan metode kualitatif eksplanatif. Media milik Qatar ini merupakan media yang berani mengkritik pemerintah dan menjadi wadah bagi kelompok oposisi seperti Ikhwanul Muslimin. Sebagai media massa, *Al Jazeera* sebenarnya memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir masyarakat dan memicu perubahan politik di suatu negara seperti misalnya saat *Arab Spring*.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama mengkaji mengenai *Al Jazeera* dan kaitannya dengan Arab Saudi dan Qatar, sedangkan yang menjadi perbedaan ialah teori penelitian yang digunakan serta fokus permasalahan yang berbeda.

Penelitian kedua dilakukan oleh Mohamed Zayani pada tahun 2016 dengan judul penelitian *Al Jazeera's Complex Legacy: Thresholds for an Unconventional Media Player from the Global South*. Penelitian ini menyebutkan bahwa *Al Jazeera* sebagai media yang berusaha terbuka dan menampilkan kebebasan bicara yang berbeda dengan apa yang berlaku di Arab. *Al Jazeera* selama bertahun-tahun selalu menjadi sumber kebanggaan bagi jaringan. persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama -sama menjadikan *Al Jazeera* sebagai objek kajian permasalahan sedangkan yang menjadi perbedaan ialah bahwa penelitian terdahulu ini lebih fokus kepada peran *Al Jazeera* yang selama ini dipertentangkan oleh negara Arab Saudi. Melalui penelitian ini peneliti mengetahui bagaimana peran *Al Jazeera* dalam menyampaikan berita dan informasi mengenai pemerintahan.

Penelitian ketiga merupakan artikel yang ditulis oleh Ansar Amini pada tahun 2016

---

<sup>10</sup> Agung et al., "Al Jazeera Dalam Blokade Politik Qatar Tahun 2017."

dengan judul *Qatar's Modern Diplomacy and Al Jazeera's Role in Middle East's Evolutions over the Recent Decades*<sup>11</sup> penelitian ini membahas mengenai peran *Al Jazeera* dalam evolusi Timur Tengah selama beberapa dekade terakhir. Sebagai manifestasi besar dari diplomasi modern di Timur Tengah selama beberapa dekade terakhir, Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah mengkaji mengenai peran *Al Jazeera* bagi Qatar dan dampaknya pada negara-negara di kawasan timur tengah, sedangkan yang menjadi perbedaan ialah bahwa penelitian ini penulis membahas pertanyaan tentang bagaimana diplomasi modern Qatar telah menjadikannya negara yang aktif di Teluk Persia dan juga di kawasan Timur Tengah, dan sejauh mana peran *Al Jazeera* dianggap penting. Penelitian ini memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai bagaimana dampak keberadaan *Al Jazeera* sehingga dapat mempengaruhi revolusi di kawasan negara timur tengah. Bahwa peran berani jaringan *Al Jazeera* dalam diplomasi Qatar serta fakta bahwa dengan liputan beritanya selama peristiwa Timur Tengah baru-baru ini, jaringan tersebut telah mampu menampilkan kekuatan diplomasi modern dan memperkenalkan dirinya sebagai pemain aktif di hadapan kekuatan regional seperti Iran, Arab Saudi, dan Turki.

Penelitian dilakukan Karim Pourhamzavi dan Philip Pherguson dengan judul penelitian oleh *Al Jazeera And Qatari Foreign Policy: A Critical Approach*.<sup>12</sup> Penelitian ini mengeksplorasi jaringan *Al Jazeera* dan hubungannya dengan negara yang mengaturnya dan terus mendanainya. Hubungan antara negara Qatar dan *Al Jazeera* juga membatasi independensi dan objektivitas jaringan tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

---

<sup>11</sup> Ansar Amini and Mehdi Akbarsefat, "Qatar's Modern Diplomacy and Al Jazeera's Role in Middle East's Evolutions over the Recent Decades," *Journal of Sociological Research* 7, no. 1 (2016): 123, <https://doi.org/10.5296/jsr.v7i1.9580>.

<sup>12</sup> Karim Pourhamzavi and Philip Pherguson, "Al Jazeera and Qatari Foreign Policy: A Critical Approach," *Journal of Media Critiques* 1, no. 2 (2015): 11–27, <https://doi.org/10.17349/jmc115301>.

dilakukan penulis ialah mengenai pembahasan hubungan *Al Jazeera* dan hubungannya dengan negara Qatar, sedangkan yang menjadi perbedaan bahwa penelitian ini mensurvei liputan berita Arab *Al Jazeera* (Agustus 2014-Agustus 2015) tentang konflik di Irak dan tiga liputan program urusan terkini AJA (Januari 2014-Agustus 2015) tentang konflik di Irak, Suriah dan Mesir bahwa *Al Jazeera* adalah bahwa media yang tidak berbohong kepada mereka seperti yang dilakukan *Voice of the Arabs* pada tahun 1969

Dari sejumlah penelitian terdahulu tersebut *Gap Research* penelitian ditemukan bahwa dari Agung, dkk menemukan bahwa *Al Jazeera* sebenarnya justru memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir masyarakat, sedangkan dalam penelitian Mohamed Zayani pada tahun 2016, ditemukan bahwa *Al Jazeera* justru diketahui sebagai media yang berusaha terbuka dan menampilkan kebebasan bicara yang berbeda dengan apa yang berlaku di Arab. *Al Jazeera* selama bertahun-tahun selalu menjadi sumber kebanggaan bagi jaringan kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Ansar Amini pada tahun 2016 bahwa *Al Jazeera* justru menunjukkan peran berani jaringan *Al Jazeera* dalam diplomasi Qatar serta fakta bahwa dengan liputan beritanya selama peristiwa Timur Tengah baru-baru ini, jaringan tersebut telah mampu menampilkan kekuatan diplomasi modern dan memperkenalkan dirinya sebagai pemain aktif di hadapan kekuatan regional seperti Iran, Arab Saudi, dan Turki. Kemudian dalam penelitian Karim Pourhamzavi dan Philip Pherguson *Gap Research* yang ditemukan bahwa *Al Jazeera* justru menunjukkan pada khalayaknya perspektif yang jauh lebih terbatas tentang konflik di Timur Tengah dan dunia Arab yang lebih luas .

Alasan peneliti memilih kajian pustaka tersebut dikarenakan karya ilmiah yang telah dijelaskan diatas dapat mendukung peneliti untuk menganalisis permasalahan yang sedang

diangkat dalam penelitian ini serta dapat menjadi data pembanding terkait permasalahan yang sedang dibahas.

## **1.6 Kerangka Teoritis**

Dalam penelitian di ranah ilmu Hubungan Internasional dan khususnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Konstruktivisme sebagai pendekatan yang menjadi patokan utama dalam membahas serta menjelaskan penelitian ini. Konstruktivisme muncul sebagai prespektif studi ilmu hubungan internasional yang berposisi di dalam wadah yang bernama Post Modernisme, Prespektif Kritis, Post Kolonialisme. Berbeda dengan pendekatan ilmu Hubungan Internasional lainnya seperti realisme yang mengutamakan sebuah kekuatan ataupun pluralisme yang mengutamakan paradigma pemikiran sosial untuk menilai sesuatu masalah. Konstruktivisme mempunyai sebuah asumsi bahwasanya setiap aktor internasional harus melihat segala sesuatunya berdasarkan paradigma fenomena sosial yang terjadi.

Konstruktivisme bisa dijelaskan dengan sesuatu pemikiran yang memiliki suatu pandangan yang menyatakan bahwa hubungan internasional sebagai salah satu bentuk hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi faktor-faktor material dan faktor-faktor ideational. Konstruktivis menambahkan pemahaman bahwa diplomasi dan konflik antarbangsa merupakan proses interaksi yang ditentukan oleh derajat kesenjangan ataupun keselarasan persepsi satu aktor dengan yang lain mengenai berbagai hal yang menyangkut hubungan mereka, terutama apakah hubungan dua arah diantara mereka mengindikasikan gejala penciptaan kebaikan bersama *common good*. Para penganut cara pandang konstruktivisme tentang hakikat dunia sosial dalam Studi HI mengadopsi premis konstruksi sosial (social construction) bahwa individu dan kelompok secara aktif menciptakan lingkungan tempat mereka berinteraksi – dari level

mikro hingga makro, walaupun mereka tidak mampu mengatur seluruh kejadian dan faktor eksternal seperti yang diinginkan sehingga dalam konteks politik global tindakan para aktor dimungkinkan, dan pada waktu bersamaan dibatasi, melalui pelbagai kondisi serta institusi yang sudah berevolusi secara historis. Cara pandang konstruktivis mengenai karakter hubungan antaraktor internasional demikian dikonseptualisasikan oleh Alexander Wendt menjadi sebuah proposisi ‘, yang kemudian menjadi ciri khas dan label paradigma konstruktivisme HI. *anarchy is what states make of it*’.<sup>13</sup>

Konstruktivisme menawarkan gagasan-gagasan yang berbeda dengan tiga unsur fundamental kerangka analisis dan teorisasi neo-neo, yang meliputi; individualisme metodologis, materialisme kepentingan yang berlandaskan pada pilihan-pilihan rasional, dan sistem anarkis yang mendorong perilaku strategis aktor internasional. Konstruktivisme lalu dapat dipahami sebagai perspektif HI yang mengedepankan makna dan interpretasi bersama sebagai komponen analitis esensial di balik tindakan para aktor. konstruktivis selalu mengadakan proses konstruksi dan rekonstruksi terhadap fakta dan praktek sosial yang bekerja di balik tatanan politik global.<sup>14</sup>

Diawal kemunculannya, praktik diplomasi dilakukan guna menjaga hubungan baik antara negara dan menghindari konflik. Namun seiring dengan berkembangnya isu, aktor, hingga metode diplomasi, alasan negara perlu melakukan praktik diplomasi pun turut berkembang. Setiap negara didunia memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Guna memenuhi kepentingan nasional tersebut, negara tidak mungkin mampu memenuhinya sendiri sehingga negara membutuhkan kerjasama dengan negara lainnya. Kepentingan nasional ini kemudian diformulasikan melalui politik luar negeri dan juga kebijakan luar negeri dan disinilah diplomasi

---

<sup>13</sup> Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik, Neorealisme* (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS), 2018). Hlm.148

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm,153

memainkan peranannya, yakni sebagai medium bagi negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lainnya. Selain untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara, diplomasi juga diperlukan guna menjaga perdamaian dunia.<sup>15</sup>

Media *diplomacy* merupakan perkembangan dari konvergensi perubahan revolusioner dalam politik dan komunikasi telah menciptakan sistem pemerintahan baru yang didominasi media. Beberapa pengamat menyatakan bahwa transformasi kekuatan media ini telah menciptakan fenomena baru dalam hubungan luar negeri, yang dikenal sebagai '*CNN (Cable News Network) Efek*', dimana perubahan mendasar dalam diplomasi, politik dan komunikasi global telah menciptakan mode interaksi baru antara media dan diplomasi. telah ada upaya untuk menciptakan frase yang menangkap peran baru media global - dan televisi khususnya - dalam diplomasi berbentuk diplomasi media, sampai saat ini perluasan peran media dalam diplomasi hanya mendapat sedikit perhatian nyata dalam disiplin hubungan internasional, politik ilmu dan komunikasi.

Diplomasi media sering dihubungkan dengan diplomasi publik. Setelah mendefinisikan diplomasi publik sebagai propaganda, Van Dinh menjelaskan bahwa diplomasi ini 'menjadi identik dengan diplomasi TV. Politisi dan diplomat menggunakan TV untuk propaganda internasional, yang pada gilirannya melebur menjadi propaganda domestik. Media *diplomacy* merupakan penggunaan media untuk mengartikulasikan dan mempromosikan kebijakan luar negeri. Diplomasi media, ketika satu atau kedua belah pihak siap untuk resolusi konflik dan mencari negosiasi dan kesepakatan. Diplomasi media mengacu pada penggunaan media oleh pejabat untuk berkomunikasi dengan aktor negara dan non-negara, untuk membangun kepercayaan dan memajukan negosiasi, dan untuk memobilisasi dukungan publik untuk

---

<sup>15</sup> Frisca Alexandra and Dadang Ilham K. Mujiono, *Pengantar Diplomasi, Sejarah Teori Dan Kasus* (Samarinda: Mulawarman University Press, 2019). Hlm.13

kesepakatan. Diplomasi media ditempuh melalui berbagai kegiatan rutin dan khusus media termasuk konferensi pers, wawancara dan kebocoran, serta kunjungan kepala negara dan mediator ke negara-negara saingan dan acara media spektakuler yang diselenggarakan untuk mengantar kepada era kebijakan baru.<sup>16</sup>

Media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan atau pendapat, sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju.<sup>17</sup> Media dapat mempengaruhi khalayak sesuai dengan fungsinya sebagai berikut:

a. Fungsi informasi

Media telah menjadi alat untuk mencari informasi bagi masyarakat. Dari media-lah berita lokal, nasional, dan manca Negara dapat diterima.

b. Fungsi agenda

Melalui media, agenda manusia ditentukan. Orang akan mengerjakan apa hari ini banyak dipengaruhi oleh media.

c. Fungsi membujuk, Bagaimana pun media juga memiliki kekuatan untuk membujuk atau merayu pendengar, penonton atau pembacanya.<sup>18</sup>

Teori kebijakan luar negeri diungkapkan oleh sejumlah ahli diantaranya, Hermann, mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai “tindakan terarah yang terpisah yang dihasilkan dari keputusan tingkat politik individu atau kelompok individu. Hermann mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai perilaku negara. George Modelski, mendefinisikannya sebagai

---

<sup>16</sup> Eytan Gilboa, “Diplomacy in the Media Age: Three Models of Uses and Effects,” *International Journal of Phytoremediation* 12, no. 2 (2007): 1–28, <https://doi.org/10.1080/09592290108406201>. hlm.10

<sup>17</sup> Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm.2

<sup>18</sup> Hari Niryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). hlm.60

Sistem aktivitas yang dikembangkan oleh komunitas untuk mengubah perilaku negara lain dan untuk menyesuaikan aktivitas mereka sendiri dengan lingkungan internasional. Kebijakan luar negeri harus menyoroti cara-cara negara berusaha untuk berubah, dan berhasil mengubah perilaku negara-negara lain.<sup>19</sup>

Modelski, hanya mencatat aspek-aspek kebijakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku negara yang ada, sebagai tujuan utama kebijakan luar negeri. Namun, kebijakan luar negeri tidak hanya untuk mengubah, tetapi juga kelanjutan dari perilaku pada waktu yang berbeda. Ini menyangkut perubahan dan status quo sejauh mereka melayani kepentingan nasional Menurut Joseph Frankel, Kebijakan luar negeri terdiri dari keputusan dan tindakan, yang sampai batas tertentu melibatkan hubungan antara satu negara dengan negara lain.<sup>20</sup>

Dengan demikian, kebijakan luar negeri melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan di dalam batas-batas negara, yang ditujukan terhadap kekuatan-kekuatan yang ada di luar perbatasan negara. Ini terdiri dari perumusan dan implementasi seperangkat ide yang mengatur perilaku negara saat berinteraksi dengan negara lain untuk mempertahankan dan meningkatkan kepentingan nasional mereka. Dalam kata-kata Padelford dan Lincoln, “Kebijakan Luar Negeri Suatu Negara adalah totalitas dari hubungannya dengan lingkungan eksternal. Kebijakan Luar Negeri adalah hasil keseluruhan dari proses di mana suatu negara menerjemahkan tujuan dan kepentingannya yang dipahami secara luas ke dalam tindakan-tindakan khusus untuk mencapai tujuannya dan mempertahankan kepentingannya”. Dua fungsi kebijakan luar negeri dapat digali dari definisi Padelford dan Lincoln; pertama, kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai tujuan

---

<sup>19</sup> Bojang AS, “The Study of Foreign Policy in International Relations,” *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 06, no. 04 (2018), <https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000337>. Hlm.2

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.2

yang dikandungnya dan kedua, untuk menekan kepentingan nasionalnya.

Dalam wawasan Huge Gibson, “kebijakan luar negeri adalah rencana menyeluruh yang menyeluruh berdasarkan pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan urusan pemerintahan dengan seluruh dunia. Ini bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan bangsa-bangsa. Tambahan yang menarik dari definisi Padelford dan Lincoln dalam wawasan Huge bahwa kebijakan luar negeri ialah seberapa jauh negara bersedia menggunakan sarana yang mereka miliki untuk mencapai kepentingan mereka.

Dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa propaganda berasal dari bahasa Latin modern ‘propagare’ yang berarti mengembangkan atau memekarkan. Arti propaganda tersebut kemudian dimaknai secara kontekstual sebagai rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda menjadi kajian yang sangat menarik tidak terlepas karena memiliki sejarah cukup mencengangkan. Misalnya propaganda yang dilakukan pada saat terjadinya reformasi Gereja Katolik Roma pada tahun 1622, Perang Dunia 1, dan juga pada Perang Dunia ke-2. Setelah itu para tokoh komunikasi pun kemudian banyak yang mengkaji lebih dalam tentang propaganda dan mendefinisikannya berdasarkan temuan-temuan yang mereka dapatkan dari berbagai latar belakang disiplin ilmu.

Konsep propaganda diajukan oleh psikolog Harold Lasswell pada tahun 1920, yang menyatakan propaganda merupakan pengaturan dari perilaku kolektif dengan melakukan manipulasi pada simbol-simbol yang signifikan.<sup>21</sup> Penggunaan istilah “perilaku kolektif” adalah upaya untuk melakukan pemotretan terhadap opini publik, sebuah tata nilai bersama tanpa

---

<sup>21</sup> Wilcox, David R., (2005). The theory of propaganda. in Propaganda, the press and conflict. Routledge.

melihat adanya kedekatan secara fisik. Melalui “simbol signifikan”, Lasswell mencoba menangkap stimulus-stimulus yang kemudian menghasilkan sebuah reaksi. Kemudian Laswell memberikan penjelasan lain mengenai fungsi propaganda dimasyarakat di mana terjadi ketidakteraturan sosial akibat adanya perubahan teknologi yang sangat cepat. Jacques Ellul kemudian menawarkan suatu definisi mengenai propaganda sebagai seperangkat metode yang digunakan oleh kelompok terorganisir yang kemudian ingin menggiring partisipasi aktif maupun pasif dalam tindakannya kepada sejumlah massa individu yang disatukan melalui suatu proses manipulasi psikologis dan terkoordinir dalam dengan organisasi tersebut. Dengan menyebutkan kata “pasif”, Ellul memperluas jangkauan respons publik yang tidak hanya mencakup pendukung aktif tetapi juga menjangkau para audiensi yang secara pasif menerima ide propaganda tersebut dan tidak secara aktif melakukan perlawanan.

Lebih jauh lagi James E. Combs dan Dan Nimmo (1994), menjelaskan bahwa propaganda adalah sebagai berikut; a. Usaha yang disengaja dan sistematis untuk mencapai respons yang lebih jauh lagi merupakan tujuan yang diinginkan oleh ahli propaganda. b. Sebuah usaha untuk memengaruhi opini dan tingkah laku.<sup>22</sup> Situasi propaganda yang tipikal adalah A melalui suatu metode atau metode lain yang berhubungan dengan B sehingga cenderung memengaruhi tingkah laku B. c. Semua usaha yang membujuk setiap orang untuk percaya atau untuk suatu bentuk tindakan. d. Usaha untuk memengaruhi personalitas dan mengontrol tingkah laku individual menuju tujuan akhir yang dianggap tidak ilmiah atau nilainya meragukan dalam masyarakat pada waktu yang ditentukan.

Dari pendefinisian yang dilakukan oleh para ahli di atas bias diambil beberapa kata kunci

---

<sup>22</sup> Bryant, J., & Zillmann, D. (2002). Using television to alleviate boredom and stress: Selective exposure as a function of induced excitational states. *Journal of Broadcasting*, 28, 1–20.

dalam memahami propaganda yaitu menyebarluaskan pesan, memengaruhi pendapat, tujuan, dan sesuatu yang telah direncanakan. Dengan demikian, propaganda bisa didefinisikan secara sederhana sebagai suatu usaha yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara berulang-ulang dalam menyebarkan pesan untuk memengaruhi seseorang, khalayak atau bangsa untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat, dan tingkah laku agar melaksanakan kegiatan tertentu dengan kesadaran sendiri tanpa terpaksa atau dipaksa.

Framing berasumsi bahwa media bisa membentuk perspektif tertentu, atau “memutar” (*spin*), terhadap peristiwa yang disajikannya. Pada gilirannya, ini akan berpengaruh terhadap sikap publik terhadap peristiwa tadi. Framing ini disebut juga sebagai *second level of agenda-setting*. Ghanem (1997: 3) menyatakan bahwa dengan framing, agenda-setting tidak lagi hanya menanyakan ‘*what to think about*’, namun juga ‘*how to think about*’.<sup>23</sup> Yang menjadi perhatian analisis framing adalah atribut suatu topik, dan bagaimana atribut ini akan berpengaruh terhadap opini publik. Ini menjelaskan pada tahap pertama, yang menjadi fokus adalah agenda media.

Apa yang akan diangkat oleh media? Itulah agenda media, misalnya mengangkat isu kepemimpinan nasional. Setelah agenda media dimunculkan ke tengah publik, maka isu kepemimpinan nasional ini lantas menjadi topik pembicaraan publik. Itulah agenda setting. Di mana framing? Kepemimpinan nasional adalah topik. Atribut yang mungkin disoroti adalah religiusitas, pendidikan, ketegasan dan seterusnya. Media bisa jadi membesarkan bahwa kepemimpinan nasional yang pas bagi bangsa adalah yang tegas. Bila demikian, maka publik juga akan turut berfikir bahwa tidak saja kepemimpinan nasional itu penting, namun figurnya pun menjadi penting.

---

<sup>23</sup> Wanta, W & Ghanem, S, “Effects of Agenda Setting” dalam Preiss, R.W et. Al (Eds.) (2007) *Mass Media Effects Research: Advanced Through Meta-Analysis*. Mahwah, NJ, London: Erlbaum

Sebagai misal, Iyengar dan Simon (1993) mendapati efek framing dalam penelitiannya pemberitaan Perang Teluk.<sup>24</sup> Responden yang sangat mempercayai berita televisi, di mana dalam berita itu ditekankan perkembangan militer Amerika Serikat, menyatakan dukungannya terhadap invasi militer ke Irak ketimbang mendukung solusi diplomatik. Penelitian lain yang menunjukkan framing dilakukan oleh Andsager & Powers (1999) tentang pemberitaan kanker payudara pada tahun 1990an.<sup>25</sup> Temuannya adalah bahwa majalah wanita lebih menyajikan informasi secara lebih personal dan komprehensif, sementara majalah berita menyajikan liputan dengan frame perspektif ekonomi, yang menekankan pada biaya riset kanker dan asuransi. Tampak bahwa media, untuk isu yang sama, memberikan framing yang berbeda terhadap atribut isunya. Akibatnya adalah kognisi khalayak akan dipengaruhi oleh pilihan framing media.

Priming dan framing merupakan dua proses pengaruh media yang membantu menjelaskan bagaimana khalayak dipengaruhi media. Priming adalah proses di mana isu yang diangkat media akan mengingatkan publik akan informasi sebelumnya yang mereka miliki tentang isu itu, sehingga akan memicu perhatian yang lebih. Priming adalah dampak dari stimulus yang sudah ada sebelumnya yang akan mempengaruhi tindakan atau penilaian yang akan dilakukan kemudian. Dalam konteks media, priming adalah dampak dari isi media (misalnya liputan tokoh politik) terhadap perilaku atau penilaian khalayak yang muncul kemudian (misalnya mendukung/menghukum dalam pemilu) (Roskos-Ewoldsen et al., 2007: 53).

---

<sup>24</sup> Iyengar, S., & Simon, A. (1993). News coverage of the Gulf crisis and public opinion. *Communication Research*, 20(3), 265–283.

<sup>25</sup> Andsager, J. L., & Powers, A. (1999). Social or economic concerns: How news and women's magazines framed breast cancer in the 1990s. *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 76(3),

Ada dua karakter penting dari priming. *Pertama*, kekuatan fungsi priming merupakan fungsi ganda (*dual effect*) dari intensitas dan kebaruan (*recency*). Intensitas merujuk pada frekuensi atau durasi, sedang kebaruan merujuk pada jarak waktu antara prime dan target. Kedua, dampak priming akan menghilang seiring waktu. Teori tentang priming dibangun atas dasar asumsi bahwa orang tidak mengelaborasi pengetahuan tentang persoalan politik dan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang diketahuinya ketika membuat keputusan politik. Yang paling diperhatikan adalah apa yang paling cepat melintas di dalam pikirannya. Dengan memberikan perhatian pada aspek tertentu dari politik, media akan membantu untuk menentukan penilaian politik, termasuk evaluasi terhadap tokoh politik (Alger, 1989: 127)<sup>26</sup>

## 1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena dengan menggunakan metode ini penulis mendapatkan data yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder.<sup>27</sup> Sehingga data yang didapat berupa tulisan atau informasi yang penulis dapatkan dari informan serta data data yang penulis cari. Penelitian kualitatif bersifat sebagai *human instrument* yang artinya dalam mengumpulkan data harus memperhatikan sumber informasi, menilai kualitas data, dan dapat memberikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Alger, D.E. (1989). *The Media and Politics*. New Jersey: Prentice Hall.

<sup>27</sup> Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

<sup>28</sup> *Ibid.* 305

## **1.8 Teknik Pengumpulan Data**

Dengan penggunaan metode penelitian kualitatif penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen untuk mendapatkan data data yang bersifat sekunder. Teknik pengumpulan data ini juga dilakukan oleh penulis sebagai langkah utama yang dilakukan untuk melakukan penelitian, karena tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan demi berhasilnya suatu penelitian.<sup>29</sup>

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Didalam bab ini akan membahas pendahuluan yang mendasari penelitian yang dilakukan, didalamnya berisi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data serta Sistematika Pembahasan.

### **BAB II : PRAKTIK KEBIJAKAN DIPLOMASI PUBLIK QATAR MENGGUNAKAN MEDIA *AL JAZEERA***

Didalam bab ini akan membahas secara umum mengenai negara Qatar seperti silsilah keluarga Al Thani, Sejarah *Al Jazeera* serta Politik dan Hukum di Qatar. Serta, praktik kebijakan diplomasi publik Qatar menggunakan media *Al Jazeera* pada tahun 2010 - 2013 dan bagaimana *Al Jazeera* berperan dalam *Arab Spring* .

### **BAB III : PERAN DAN BENTUK DUKUNGAN *AL JAZEERA* DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH QATAR SAAT *ARAB SPRING***

---

<sup>29</sup> Ibid. 334

Bab ini akan lebih membahas tentang analisis dari penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah diberikan. Didalam bab ini juga akan membahas secara komprehensif bagaimana negara Qatar menggunakan *Al Jazeera* untuk menggiring opini publik masyarakatnya agar sejalan dengan pemerinthan Qatar.

#### **BAB IV : KESIMPULAN**

Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang sudah dilakukan.